

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA
PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memproleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

ROSMINI

NIM..217120130

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI PERBANKAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

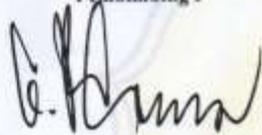
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PADA DESA PLAMPANG KECAMATAN
PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 02 febuari 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. Abdurrahman, M.M.
NIDN.0804116101

Pembimbing II



Baiq Reinalda Tri Yunarni, S.E., M.Ak
NIDN. 0807058301

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Universitas Muhammadiyah Mataram



Lalu Hendra Maniza, S.Os., MM
NIDN.0828108404

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA PLAMPANG
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Oleh :

ROSMINI

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal: 8 Febuari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji



Drs. Abdurrahman, M.M.
NIDN. 0804116101

(PU) (.....)

Baiq Reinalda Tri Yunarni, S.E., M.Ak
NIDN. 0807058301

(PP) (.....)

Lalu Hendra Maniza, S.Sos, MM
0828108404

(PN) (.....)

Mengetahui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi
Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : ROSMINI

Nim : 217120130

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa** " adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang dituliskan atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram, 08 Februari 2021
Penulis,

ROSMINI
Nim, 217120130



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.uh-summata.ac.id> E-mail : upt.perpusummata@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROXMINI
NIM : 217120130
Tempat/Tgl Lahir : Plampang, 22 September 1999
Program Studi : Adm. Bisnis
Fakultas : Fiapol
No. Hp/Email : 081 900 540 726 / 081 900 081 204
Judul Penelitian : -

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Pada desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 61% 48% 21%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 3 Februari 2021

Penulis




NIM. 217120130

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmini
 NIM : 21720130
 Tempat/Tgl Lahir : Plampang 22 September 1999
 Program Studi : Adm. Bisnis
 Fakultas : Fiapal
 No. Hp/Email : 085 902 840 726 / Rosmini2009
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sambas

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 8 Februari 2021

Penulis


 METERAI TEMPEL
 6000
 ROSMINI
 NIM. 21720130

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Skandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



RIWAYAT HIDUP

ROSMINI, lahir pada 22 September 1999 di Desa Plampang, Kec. Plampang Kab. Sumbawa Besar, Provinsi NTB. Buah kasih pasangan dari “ bapak KENUN dan ibu SAHRIM “.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar SDN 1 Plampang tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.

Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMPN 1 Plampang dan selesai pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Plampang dengan jurusan IPS dan selesai pada tahun 2017. Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Matram, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan Alhamdulillah selesai di tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan ALLAH SWT, setiap usaha yang disertai dengan doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram. Alhamdulillah penulis dapat mampu menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa**”

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha kita pasti sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses bukan banyak protes tapi harus selalu keep on progress.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda KENUN dan Ibunda SAHRIM, Ketulusanya dari hati atas doa yang tidak pernah putus, semangat yang tak pernah ternilai. Serta untuk orang-orang terdekat saya yang selalu ada dan selalu menyayagi saya dengan sepenuh hatinya TERIMAKASIH



ABSTRAK

ROSMINI : ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2019”.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) di desa plampang kecamatan plampang kabupaten sumbawa tahun 2017-2019. Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis deskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini untuk mengetahui signifikansi tingkat efektivitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Implikasi dari efektivitas anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Plampang khususnya dan Kepala Desa umumnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Desa secara efektif dan efisien. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

**Kata Kunci: Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
Implikasi**

ABSTRACT

ROSMINI: AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE EXPENDITURE REVENUE (APBDES) IN PLAMPANG VILLAGE, PLAMPANG DISTRICT, SUMBAWA REGENCY, 2017-2019 *.

This study aims to determine the effectiveness of the village expenditure revenue or APBDES in the Plampang village, Plampang District, Sumbawa Regency in 2017-2019. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis methods. The results are to determine the effectiveness level of the village budget management. The implications of the Village Expenditure Budget's effectiveness are as input for the Village Head of Plampang in particular and the Village Head to improve the quality of Village development effectively and efficiently. For the village government, this study's results are expected to be used as evaluation and consideration in determining policies that can improve village financial management so that development can be carried out evenly and on target.

Keywords: Effectiveness, Village Expenditure Revenue (APBDES)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya limpahkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M. pd. Selaku Rektor Universitas.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Adminitrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membimbing dan membina kami selama pelaksanaan kegiatan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs.H.Abdurrahman, M.M selaku pembimbing pertama
5. Bunda Baiq Reinalda Tri Yunarni, S.E., M.Ak Selaku Sekertaris Prodi Sekaligus pembimbing ke dua

6. Kepada orang tua saya Ayahanda KENUN dan Ibunda SAHRIM yang sangat berjasa dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan tanpa lelah hingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
7. Kepada kedua Adik-adik saya ARDIANSYAH dan BAGAS SAPUTRA yang selalu mensupport saya sehingga Skripsi ini dapat terselsaikan sesuai harapan
8. Rekan-rekan seperjuangan saya Mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyusun Skripsi ini.

Tiada kata yang dapat melukiskan kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan selain untaikan do'a semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalasnya dengan yang lebih baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan/ isi dari proposal ini. Akhirnya penulis meminta maaf atas kekurangan. Semoga proposal ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan kita semua. Amin.

Mataram, 10 Januari 2021

Penulis

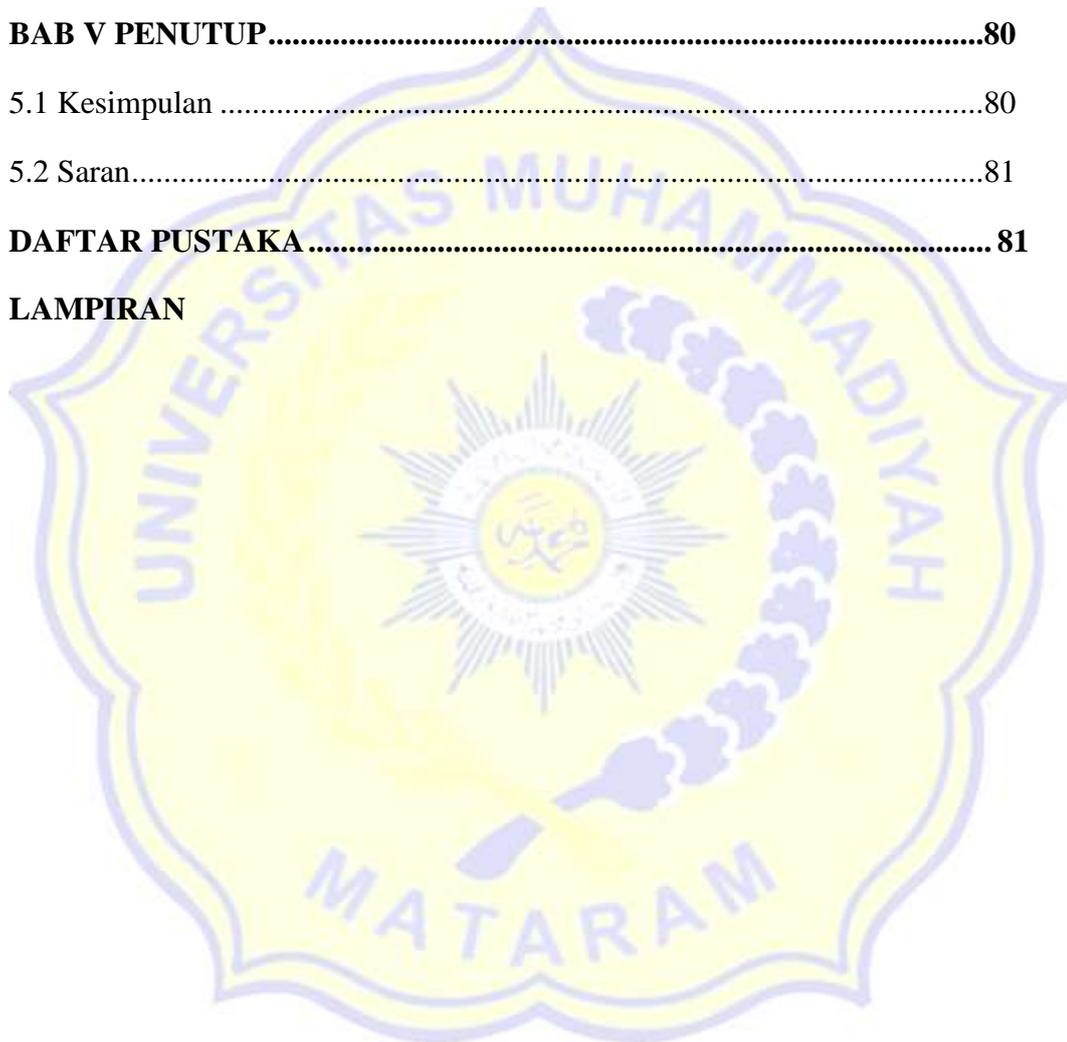
ROSMINI

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	vii
HALAMAN MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	7
1.3 TujuanPenelitian	7
1.4 ManfaatPenelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 PenelitianTerdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Definisi Pemerintah Desa.....	13
2.2.2 Azas Pengelolaan Keuangan Desa	15

2.2.3 Teori Pengelolaan Keuangan desa	16
2.2.4 Anggaran	17
2.2.5 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)	20
2.2.6 Efektivitas	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan penelitian.....	25
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Sumber Data.....	27
3.5 Metode Penelitian Narasumber	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum	36
4.1.1 Sejarah Desa Plampang	37
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Plampang	39
4.1.3 Visi Dan Misi Desa Plampang	42
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Plampang.....	42
4.1.5 Kependudukan	47
4.2 Proses Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.....	50
4.2.1 Perencanaan.....	52
4.2.2 Pelaksanaan RPJM Desa	64
4.2.3 Penatausahaan	70
4.2.4 Pelaporan.....	72

4.2.5 Penanggung Jawaban	75
4.3 Faktor-faktor yang memperengaruhi Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.....	76
4.3.1 Faktor Pendukung	76
4.3.2 Faktor Penghambat.....	77
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Kriteria Kinerja Keuangan	26
2. Data APBDes tahun 2017	10
3. Pedoman Wawancara	31
4. Jumlah Informan Atau pun Narasumber Desa Plampang	33
5. Batas Administrasi Desa Plampang	37
6. Letak Geografis Desa Plampang	40
7. Data Penduduk Desa Plampang	47
8. Data Jenis Pekerjaan	47
9. Data Berdasarkan Agama	49
10. Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	58
12. Pendapatan Desa Tahun 2017	61
13. Pendapatan Desa Tahun 2018	62
14. Pendapatan Desa Tahun 2019	63
15. Jenjang Pendidikan Pemerintah Desa	78

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir.....	27
2. Struktur Organisasi	43
3. Alur penatausahaan keuangan desa.....	71
4. Alur pelaporan penggunaan ADD.....	75





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sujarweni (2015), pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dan memiliki peran strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Nusa Tenggara Barat kaya akan kekayaan alam dan menyimpan beragam sumber daya alam. Sumber daya hutan, persawahan, perkebunan daerah, pertambangan, kelautan, dan potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat terjamin. Setiap tahun, rencana Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung potensi alam dan pertumbuhan ekonomi sektor infrastruktur sangat erat kaitannya dengan regulasi jalan

dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa tindakan langsung harus dilakukan. Menghilangkan gangguan dan manajemen jalan harus Jalan penghalang untuk pelaksanaan harus bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, administrasi jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada pihak yang berwenang dalam kerangka penegakan hukum. Diantara faktor-faktor lain gangguan dan hambatan fungsi jalan yang disebabkan oleh kejadian alam seperti longsor, pembukaan jalan baru, dll. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah kota, kabupaten, desa dan masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga dan memperhatikan status infrastruktur yang ada. Menurut data Jaringan Jalan Provinsi NTB telah terjadi penurunan dan peningkatan dari tahun 2015 ke 2018, dan peningkatan pembangunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, dengan peningkatan tahunan sekitar 0,51%, sementara itu turun menjadi 1,94% dari tahun 2017 menjadi 2018. Pengurangan jaringan jalan di Provinsi NTB hanya terjadi pada jalan regional dan perkotaan. (Gambaran Umum dan Kinerja Angkutan Darat di Provinsi NTB Tahun 2019).

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang memiliki otonomi penuh dan berdaulat penuh, serta memiliki norma sosialnya sendiri. Desa sebagai daerah otonom diberikan hak khusus, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie et al. (2013), pengelolaan keuangan desa berupa kebijakan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).

Desa dan komposisinya akan berubah dari waktu ke waktu di bawah pengaruh kekuatan internal dan eksternal. Pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan selalu berusaha mencari kesesuaian antara kedua kekuatan tersebut agar dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui proses observasi dan penelitian yang cermat, meliputi: sumber daya, aturan, siklus pengelolaan, personel, harapan, tujuan, komunitas, dan komitmen. Selain itu, peluang atau hambatan lain diidentifikasi dan diuji.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan ditetapkan dengan "Peraturan Desa". APBDes memuat tentang sumber pendapatan dan distribusi belanja desa dalam satu tahun. Pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting dan harus diawasi secara cermat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada PERMENDAGRI (peraturan pemerintah dalam negeri) No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilalukan dengan tertib dan disiplin anggaran ”. Pengukuran kinerja dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang utama untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa agar penggunaannya efektif, efisien, dan pembangunannya tepat sasaran.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan

negara dan memiliki arti strategis, karena kawasan pedesaan merupakan tumpuan atau tumpuan ketahanan bencana negara dalam kesatuan wilayah nasional Indonesia. Keberhasilan pembangunan pedesaan telah memungkinkan pemerataan pembangunan dan pencapaiannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis.

salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan isu permasalahan yang harus segera diatasi dalam segi penyediaan infrastruktur yang ada, karena jika dilihat dalam struktural kebijakan desa bahwa Desa Plampang merupakan ibu kota Kecamatan Plampang, maka dari itu sangat diperlukannya penyediaan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2002, Kecamatan Plampang mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka. Tahun 2004 terjadi kembali pemekaran menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge. Kecamatan Plampang terdiri dari 11 desa yang diklasifikasikan dalam 9 desa swakarya. Bertambahnya jumlah penduduk membutuhkan lahan untuk pembangunan. Seiring dengan hal itu, maka luas lahan setiap tahunnya akan mengalami pengurangan luas lahan. Karena lahan merupakan salah satu kebutuhan penduduk untuk keperluan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan perumahan serta kebutuhan fasilitas penunjang lainnya. Adapun jumlah penduduk di Desa Plampang yakni sebanyak 5.704 jiwa dengan luas wilayahnya 4.524,4 Ha.

Maka dari itu prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Plampang sangatlah lebih muda, akibatnya adanya pemekaran tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari kondisi eksisting saat ini masih banyaknya jalan yang rusak, baik rusak ringan maupun berat di sekitaran wilayah Desa Plampang. Pada tahun 2018 hingga sekarang belum adanya perbaikan, padahal jika dilihat dari struktur ruang RTRW Kabupaten Sumbawa bahwa Kecamatan Plampang merupakan pusat pelayanan kawasan perkotaan (PKK) yang berlokasi di Wilayah Desa Plampang yang berfungsi untuk melayani skala kecamatan atau beberapa desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Plampang. Jadi, semua fasilitas maupun infrastruktur pelayanan masyarakat berpusat pada desa ini. Seperti adanya ketersediaan sarana kesehatan, peribadatan, pemerintahan (Kantor Kecamatan Plampang, UPT Pertanian, Perikanan), sarana industri dan lain-lainnya. Jika dilihat dari Data APBD Desa Plampang, jumlah dana yang didapatkan pada tahun 2017-2019 yaitu 2017 sebesar (2.241.353.169,00) 2018 (1.962.005.000,(00) dan tahun 2019 sebesar (1.666.908.100.00) dengan luas wilayah hanya 4.524,4 Ha.

Otonomi daerah adalah kebijakan yang dapat memberikan takaran lebih terhadap daerah dalam menyalurkan semua urusan dan kepentingan daerah supaya dapat dikelola sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda-beda. Lahirnya otonomi daerah memberikan wawasan baru untuk pemerintahan indonesia, yang diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

1999 tentang otonomi daerah. Undang-Undang tersebut disahkan berdampingan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Perimbangan keuangan pusat daerah tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lahirnya dua undang-undang ini memberi kesempatan terhadap daerah dalam mengelola dan menggali potensi daerahnya secara maksimal. Terlebih saat munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk dalam mencapai semangat otonomi daerah sampai pada tingkat pemerintah desa.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program kegiatan, atau organisasi. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu program kegiatan atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memamfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat dalam kutipan Trianto (2016). Secara umum, kekurangan yang begitu terlihat dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah dalam mengembangkan metode alat perencanaan

anggaran yang mengarah pada kinerja, bukan pendekatan instrumental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. Dalam hal tersebut, maka penetapan standar harga satuan, kinerja proyek, serta kegiatannya adalah faktor penentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *income*. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*) Mardiasmo (2009).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa beratnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa diharapkan memiliki aparatur pemerintah yang cakap dan terampil yang mampu merencanakan pembangunan, menggerakkan, meningkatkan partisipasi masyarakat,

prakarsa, mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi atasan dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan yang direncanakan. Disamping aparat, juga mengenai macam/jenis dan besarnya sumber pendapatan Desa merupakan faktor penting sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penyelenggara pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian sumber pendapatan Desa perlu digali dan ditingkatkan. Oleh karenanya supaya penggalan sumber pendapatan Desa merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan dalam rangka kedudukan Desa sebagai pembangunan dalam mencapai tujuan Nasional.

Selain hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sebagai rencana keuangan berdasarkan pada prinsip publisitas yaitu nominal yang tercantum dalam anggaran yang dikuasakan kepada eksekutif pada dasarnya adalah milik rakyat. Demikian pula halnya penerimaan yang dianggarkan dalam anggaran yang diperoleh dari rakyat. Oleh karena itu, maka cara perolehan maupun cara penggunaannya harus diketahui oleh rakyat, dalam hal ini ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam bentuk keputusan Desa.

Berdasarkan Hasil Reseach Gaps Dari Beberapa Penelitian Terdahulu:

<p>1. Aria Nugraha (2019) dengan judul penelitian <i>Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada desa trantang sakti kecamatan buay pemuka peliung kabupaten oku timur tahun 2016-2018. Hasilnya menunjukkan bahwa apbdes tidak efektif pada tahun 2017-2019 dilihat dari rata-rata efektivitas apbdes bidang penyelenggaraan pemerintah desa</i></p>
<p>2. Amin, Mualiyanna. (2017) dengan judul penelitian <i>Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Hasilnya menunjukkan bahwa apbes pada tahun 2017 sudah efektif dilihat dari sumber daya manusia (SDM), Kordinasi yang baik, dan partisipasi masyarakat yang sangat mendukung.</i></p>
<p>3. Octaviani, Seni Wulan (2018) dengan judul penelitian <i>Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Hasil menunjukkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Pembangunan belum efektif dalam pelaksanaannya, karena menyebabkan realisasi belanja desa dalam program pembangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan dari segi perencanaannya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah tingkat desa, tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan tidak adanya baligo, dan tidak adanya pelatihan khusus untuk aparaturnya desa cangkuang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).</i></p>

Berdasarkan hasil reseach gaps ini maka sesungguhnya penelitian yang menyangkut efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) itu masih menunjukkan adanya gaps antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi tingkat efektivitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : tingkat efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

H₂ : tingkat efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

DATA APBDES 2017-2019

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	REALISASI
1.	2017	2.241.353.169,00	2.244.474.944,00
2.	2018	1.962.005.000,00	1.944.636.791,98
3.	2019	1.666.908.100,00	1.666.234.412,67

Sumber : pemerintah desa

Berdasarkan tabel diatas pendapatan desa plampang pada tahun 2017 sebesar 2.241.353.169,00 dan realisasinya 2.244.474.944,00, pada tahun 2018 pendapatan sebesar 1.962.005.000,00 dan realisasinya 1.944.636.791,98, pada tahun 2019 pendapatan sebesar 1.666.908.100,00 dan realisasinya 1.666.234.412,67

Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa khususnya di Desa Plampang Kecamatan Plampang, menerima jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Desa, sehingga Pemerintah Desa Plampang mengalami keterlambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa, penanganan disektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Inilah yang menjadi hambatan kemajuan pembangunan Desa Plampang. Upaya pemerintah Desa Plampang untuk meningkatkan kualitas penduduk seperti, menyediakan fasilitas infrastruktur jalan, balai pertemuan, usaha peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah Desa untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pada masa yang akan datang penduduk Desa Plampang semakin tinggi kualitasnya dan semakin maju tingkat kecerdasannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk diteliti mengenai :

“ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2019 .

2. Manfaat Penelitian

Mamfaat peelitian dalam menganalisis tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2019 adalah :

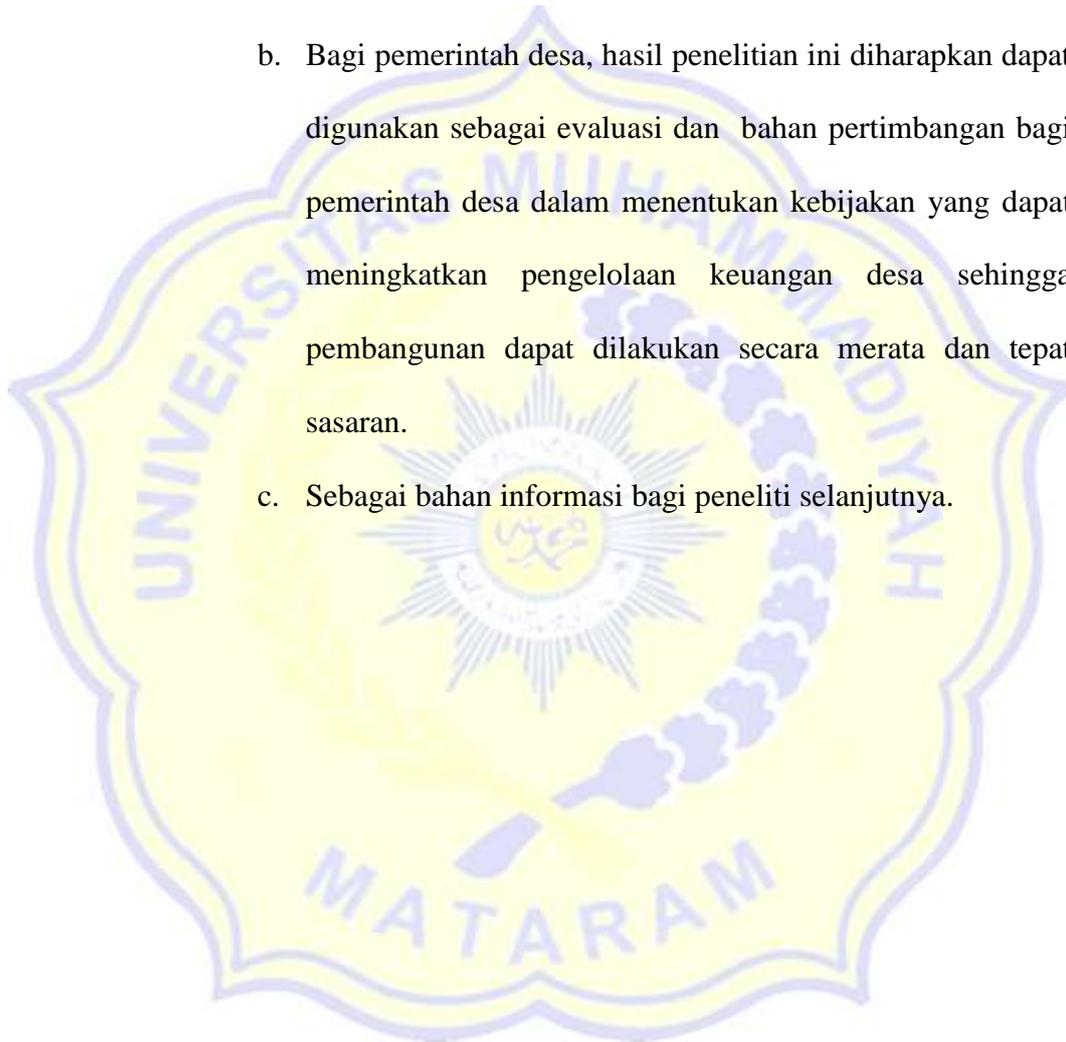
1. Teoritis

a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi keberhasilan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penyusun dalam membuka tabir dan wawasan berpikir secara lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Plampang khususnya dan Kepala Desa umumnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Desa secara efektif dan efisien.
- b. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

NO.	Unsur Penelitian	Uraian
1.	Nama & Tahun	Aria Nugraha (2019)
	Judul	<i>Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada desa trantang sakti kecamatan buay pemuka peliung kabupaten oku timur tahun 2016-2018.</i>
	Hasil Penelitian	Efektivitas anggaran pendapatan pada desa trantang sakti dari tahun 2016-2018 tergolong tidak efektif dengan rata-rata 52 %, 49,3 %, 55,3%. Hasil perhitungan juga dapat di lihat bahwa rata-rata efektivitas anggaran belanja ,desa trantang sakti pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa masing-masing adalah : tahun 2016 (100%) tergolong efektif, tahun 2017 (86,4%) tergolong cukup efektif, tahun 2018 (97,6%) tergolong efektif, kemudian pada bidang pelaksanaan pembangunan desa masing-masing adalah : tahun 2016 (90,1%) tergolong efektif, tahun 2017 (48,8%) tergolong tidak efektif, tahun 2018 (99,4%) tergolong efektif, selanjutnya pada bidang pembinaan masyarakat masing-masing adalah : tahun 2016 (100%) tergolong efektif, tahun 2017 (100%) tergolong efektif, tahun 2018 (100%) tergolong efektif, dan pada bidang

		pemberdayaan masyarakat masing-masing adalah : tahun 2016 (100 %) tergolong efektif, tahun 2017 (100%) tergolong efektif, tahun 2018 (99,7%) tergolong efektif.
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data. Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas Efektifitas APBdes.</p>
2.	Nama & Tahun	Amin, Mualiyanna. (2017)
	Judul	Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	<p>Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ditinjau dari:</p> <p>a) Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sudah Efektiv.</p> <p>b) Faktor-faktor efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa disebabkan oleh beberapa komponen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Sumber Daya Manusia • Koordinasi yang Baik; • Partisipasi Masyarakat ,
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data. Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama</p>

		membahas Efektivitas APBdes.
3.	Nama & Tahun	Octaviani, Seni Wulan (2018)
	Judul	<i>Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.</i>
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Anggaran pendapatan dan belanja desa dalam Pembangunan di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek itu belum efektif dalam pelaksanaannya, karena menyebabkan realisasi belanja desa dalam program pembangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan dilapangan dirasakan belum efektif. Kendala dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan dari segi perencanaannya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah tingkat desa, tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan tidak adanya baligo, dan tidak adanya pelatihan khusus untuk aparatur desa cangkuang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
	Perbedaan & Persamaan	<p>Perbedaan Landasan teori, Metode Pengumpulan data, sumber data dan validitas data, Lokasi penelitian.</p> <p>Persamaan Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas Efektivitas APBdes</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pemerintah Desa

Menurut beberapa ilmuwan memberikan pengertian pemerintah desa antara lain:

Otonomi desa merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak ulayat dan nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan perkembangan masyarakat desa. Dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan kebebasan pemerintahan sendiri warga desa harus ditegaskan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia, serta harus tetap berpegang pada nilai-nilai tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terwujudnya hak, kekuasaan, dan kebebasan pemerintahan sendiri warga desa memerlukan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan keutuhan negara dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1)

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah pusat, dan pelaksanaannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa merupakan proses yang menggabungkan upaya masyarakat pedesaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2006)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa dilaksanakan atas perintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut perangkat desa dibantu oleh perangkat desa, meliputi pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan menurut prakarsa masyarakat, hak untuk memberdayakan masyarakat desa. di daerah asal dan desa adat.

Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.2.2 Azas Pengelolaan Keuangan Desa Didesa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa

Keuangan desa didesa plampang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip keterbukaan adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip Akuntabel (Akuntabel) menentukan bahwa setiap kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi sistem desa dan unsur sosial desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut permandagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Yakni semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa ditugaskan dan didanai oleh APBN.

Dalam ketentuan umum Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa juga dijelaskan pemberian hak otonom kepada desa dengan tujuan dapat memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara sendiri termasuk sumber pendapatan dan pembelanjaan anggaran. Kinerja yaitu kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014)

Selain itu, Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat diukur dengan (1) efisiensi, yaitu perbandingan antara keluaran dan masukan terkait dengan tujuan atau standar kinerja yang telah ditetapkan. (2) Efektivitas adalah tingkat perbandingan antara realisasi hasil yang direncanakan dan tujuan yang ditetapkan. (3) Ekonomi mengacu pada perbandingan antara input dan nilai input yang dinyatakan dalam satuan mata uang dan laporan yang sesuai. Menurut penelitian Suwondo et al. (2013), alat ukur kinerja mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan

tugas dan dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas Aspek. Isi pengukuran meliputi: (1) prestasi kerja: (2) pengetahuan profesional: (3) perilaku: (4) kepemimpinan.

2.2.4 Anggaran

Menurut Henry Simamora (1999), anggaran merupakan rencana rinci yang menunjukkan bagaimana membeli dan menggunakan sumber daya dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat dikatakan anggaran merupakan rencana keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran sebagai rencana keuangan biasanya mencakup periode waktu tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2005)

Anggaran adalah rencana yang dirumuskan oleh sistem, termasuk semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan mata uang (units), dan berlaku untuk periode tertentu yang akan datang (Munandar, 2000)

Anggaran adalah rencana kuantitatif dalam bentuk moneter dan non-moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan ke dalam unit operasional (Hasen dan Mowen, 2004)

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa anggaran terdapat dari 4 unsur yaitu :

1. Rencana

Merupakan langkah penentuan aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam upaya mencapai tujuan yang telah

ditentukan dan disusun terlebih dahulu untuk memberikan arah bagi kegiatan-kegiatan perusahaan.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Anggaran sebagai pedoman yang mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan.

3. Satuan moneter

Anggaran dinyatakan dalam unit moneter sehingga dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang bermacam-macam satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan perusahaan yang berbeda-beda sehingga mudah untuk diperbandingkan dan dianalisa.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang

Menunjukkan bahwa anggaran disusun dan berlaku untuk waktu yang akan datang. Anggaran merupakan perkiraan atau taksiran dalam bentuk moneter yang disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan masalah waktu anggaran, dikenal dua macam anggaran :

a. Anggaran strategis (*strategic budget*), anggaran yang berlaku untuk jangka panjang.

b. Anggaran taktis (*tactical budget*), anggaran yang berlaku untuk jangka pendek. Untuk dapat memilih jangka waktu berlakunya anggaran secara lebih tepat, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu : luas pasar penjualan

produk yang dihasilkan, posisi perusahaan dalam persaingan, jenis produk yang dihasilkan perusahaan, tersedianya data dan informasi untuk melakukan penaksiran keadaan.

2.2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

Apbdes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis,2011). Penyelenggaraan pemerintah desa yang ouputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam APBdes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa, sebab melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian layanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDesa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes untuk pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan

jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis,2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, APBDesa dapat saja mengalami perubahan jika mengalami beberapa keadaan tertentu. Perubahan tersebut dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antara jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat,dan keadaan luar biasa. Semua proses tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan keadaan darurat.

2.2.6 Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial Permata Wisha (1992) Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan Amin Tunggul Widjaya (1993)

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sederhana ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Abdurahmat dalam Othenk (2008)

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah,

sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan 12 pungutan analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Target Retribusi Daerah

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:

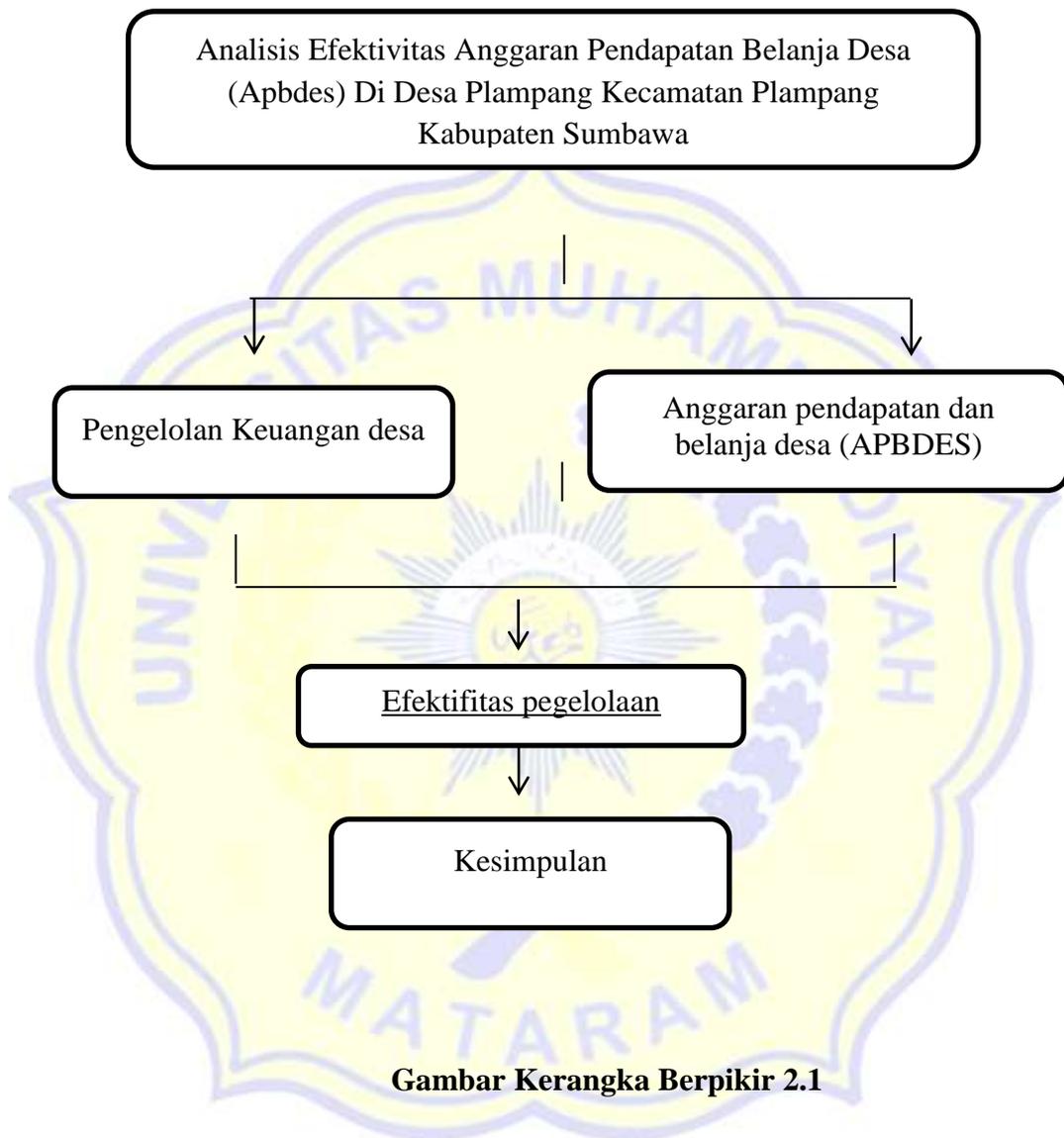
Tabel II.1

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei, 2016

Kerangka Berfikir



Gambar Kerangka Berpikir 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

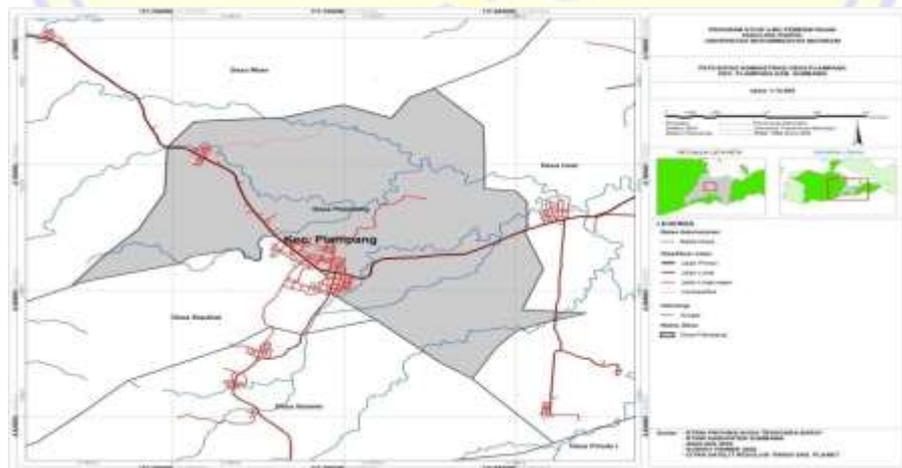
Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan metode kualitatif untuk analisis deskriptif. Menurut pengertian metode kualitatif Meleong (2006), penelitian kualitatif diartikan, yaitu, “penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami oleh objek penelitian melalui deskripsi, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Ini didasarkan pada Bentuk kata- kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu dan melalui penggunaan berbagai metode alamiah. "Selain itu, Usman (2009) dari Tatu Maftuha (2017) mendefinisikan kualitatif sebagai Pendekatan kualitatif lebih didasarkan pada filsafat fenomenologi (verstehen) yang mengutamakan apresiasi. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Metode penelitian deskriptif yaitu metode analisis data yang sederhana dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi. Objek penelitian dalam hal ini

adalah Analisis Efektivitas Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

3.2 Lokasi Penelitian

Dengan melihat tema atau judul penelitian ini, maka penelitian menunjuk tempat penelitian atau yang menjadi lokasi penelitian Ini adalah Desa Plampang Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa Besar. Dan termasuk didalamnya beberapa pihak yang dapat dijadikan beberapa informan penunjang penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam Efektivitas pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. jika dilihat dalam struktural kebijakan desa bahwa Desa Plampang merupakan ibu kota Kecamatan Plampang, maka dari itu sangat diperlukannya penyediaan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di Desa Plampang yakni sebanyak 5.649 jiwa dengan luas wilayahnya 4.524,4 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar peta dibawah ini.



Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Desa Plampang

3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang ditulis penulis, oleh karena itu penelitian ini fokus pada Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Plampang dan proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

3.4 Sumber Data

Data dalam penelitian adalah informasi yang harus dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif harus bersifat *perspective emic* artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.

Berikut data yang ingin peneliti gunakan, yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Irawan (2006) dalam (Tatu Maftuhah, 2017) menjelaskan pengertian dari kedua jenis data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia.
2. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah.)

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Informan	Uraian pertanyaan
II	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah ADD yang diterima oleh desa plampang? • Faktor –faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa didesa plampang kecamatan plampang kabupaten sumbawa? • Apa ada tim khusus untuk mengelola ADD?

Informan	Uraian pertanyaan
I2	<ul style="list-style-type: none"> • Apa ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa khususnya ADD? • Apa sama jumlah yang diterima desa plampang dengan desa lainnya yang ada dikecamatan plampang kabupaten sumbawa? • Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa didesa plampang kabupaten sumbawa?

Informan	Uraian pertanyaan
I3	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan ADD ? • Bagaimana pendapat anda tentang proses perencanaan ADD didesa plampang? • Masalah apa yang sering ditemui BPD dalam

	proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban khusus ADD?
--	--

3.5 Metode Penelitian Narasumber

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (narasumber) wawancara, menggunakan teknik *purposivesampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komperhestif mengenai strategi Kepala Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap pembangunan Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi secara partisipan dimaksudkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang strategi kepala Desa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap Pembangunan Desa.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara. Metode ini dilakukan agar mendapat informasi langsung dari pembuat kebijakan yaitu Kepala Desa plampang, sekertaris Desa plampang, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa plampang.

Tabel 3.1
Jumlah Informan Atau pun Narasumber di
Desa Plampang Tahun 2021

No	Narasumber	Jumlah (jiwa)
1.	Kepala desa plampang kecamatan plampang kabupaten sumbawa	1
2.	Sekertaris desa plampang kecamatan plampang kabupaten sumbawa	1
3.	Kepala Badan Pengawas Desa (BPD) Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.	1
4.	Perangkat Desa Plampang	6
5.	Tokoh Masyarakat	5

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan juga Dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian. Menurut Winarno Surachman dokumen adalah, “sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran itu, ditulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut”

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mencakup empat kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data, dan

pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan.

Berdasarkan Uraian diatas maka langkah yang ditempuh dalam menganalisis data dan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dilapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, mengkode data, menelusuri data dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini akan terus berlangsung sehingga laporan lengkap tersusun.

c. Pengkajian Data

Pengkajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, kedalam satuan bentuk yang dapat dipahami, pengkajian ini bisa dengan matrik, grapik, atau bagan dan dirancang untuk mengabungkan informasi.

d. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan data yang terkumpul kedalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap jawaban dari setiap permasalahan yang ada. (Matthew G. Miles dan Michael Humberman, 2002). Dengan uraian analisis diatas, maka dalam pengkajian data dalam analisis nantinya merujuk pada poin-poin diatas, sehingga hasil dari penelitian untuk skripsi ini dapat terarah dalam pembahasan.

